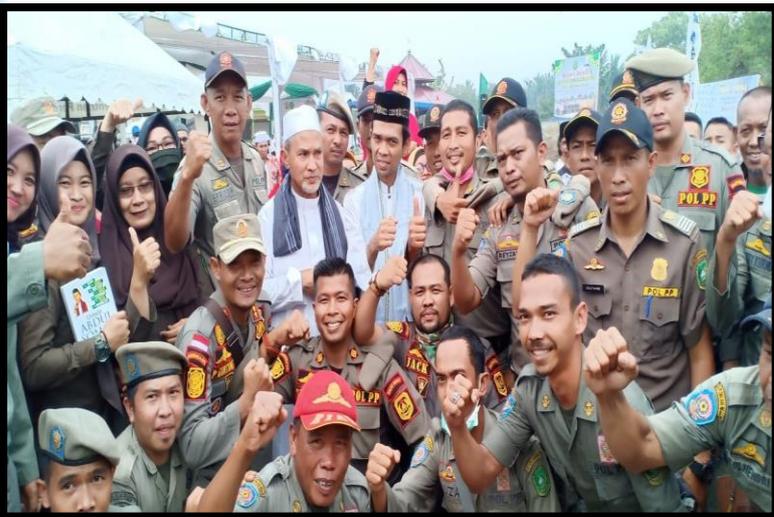




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKJIP) TAHUN 2020 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	2
1.3	Tugas dan Fungsi	4
1.4	Isu Strategis yang Dihadapi OPD.....	9
1.5	Landasan Hukum	10
1.6	Sistematika Penulisan	11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1	Rencana Strategis dan Target Tahun 2019	12
2.2	Target IKU tahun 2019	16
2.3	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1	Capaian IKU Tahun 2019.....	19
3.2	Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	21
3.3	Perbandingan Target Kinerja dengan Rencana Jangka Menengah	30
3.4	Akuntabilitas Keuangan dan Analisis Capaian Kinerja	31
3.5	Analisis Efisiensi dan Sumber Daya.....	35
3.6	Prestasi atau Penghargaan.....	41

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	42
4.2	Saran	43

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan misi guna mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Tahun 2017 – 2021.

Semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selatpanjang, Januari 2021
**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kepulauan Meranti,**

HELFANDI, SE. M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19790403 200212 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang

untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kemudian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti mengacu kepada Visi dan Misi Bupati Kepulauan Meranti yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021. Serta mengacu kepada dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017-2021.

Penyusunan Lkj IP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu aspek Penilaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD. Dalam Misi Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu “Meningkatkan pembinaan mental spiritual dan nilai-nilai luhur kebudayaan melayu dalam rangka mewujudkan masyarakat madani”. Dalam upaya merealisasikan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki program kerja secara garis besar, yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);
8. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
9. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
10. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak pidana;

1.2. Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Keputusan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh masing-masing unit kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti, maka telah ditempatkan para petugas dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.1. DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

No	Status Kepegawaian	Gol/Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti								TOTAL
			Kasat	Sekretaris	Subbag UKP	Subbag Keuangan	Bid Perda	Bid Linmas	Bid Operasi	Bid Operasi Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PNS										
1	Pembina Tk.I	IV/b	1	1							2
2	Pembina	IV/a			1	1	1	1	1		4
3	Penata Tk. I	III/d						1			1
4	Penata	III/c					2	1			3
5	Penata Muda Tk. I	III/b			1	1		1	1		4
6	Penata Muda	III/a				1				5	7
7	Pengatur Tk.I	II/d			1	2				1	4
8	Pengatur	II/c			2	1			4	6	13

9	Pengatur Muda Tk.I	II/b			1	1				5	7
10	Pengatur Muda	II/a								4	4
11	Juru Tk. I	I/d									2
12	Juru	I/c								1	1
13	Juru Muda	I/a									
TOTAL			1	1	6	7	3	3	7	22	49

GRAFIK PERBANDINGAN PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

- a. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang:
 - 1) Golongan IV sebanyak sebanyak 6 Orang
 - 2) Golongan III sebanyak sebanyak 16 Orang
 - 3) Golongan II sebanyak sebanyak 24 Orang
 - 4) Golongan I sebanyak sebanyak 3 Orang

- b. Berdasarkan Pendidikan :
 - 1) Sarjana (S-2) : 2 Orang
 - 2) Sarjana (S-1) : 19 Orang
 - 3) D-III : 4 Orang
 - 4) SLTA : 23 Orang
 - 5) SLTP : 2 Orang
 - 6) SD : 2 Orang

- c. Berdasarkan Eselon :
 - 1) Eselon II sebanyak 1 Orang
 - 2) Eselon III sebanyak 4 Orang
 - 3) Eselon IV sebanyak 7 Orang
 - 4) Non Eselon (Pelaksana) sebanyak 27 Orang

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti didukung oleh 49 (Empat Puluh Sembilan) orang PNS, 192 (Seratus Sembilan Puluh Dua) orang Tenaga Banpol dan 5 (Lima) Tenaga Kebersihan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti adalah melaksanakan tugas memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti, menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan Perundang-undangan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perundang-undangan Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dan atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah;

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Operasi, Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Bidang Perlindungan Masyarakat serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang-bidang, perumusan, Umum, Kepegawaian, perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan administrasi Keuangan dan Perlengkapan.

(1) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub bagian umum, kepegawaian dan program; dan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program.

Sub bagian umum, kepegawaian dan program; dan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kegiatan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bagian Umum dan kepegawaian meliputi penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat dan melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam menghimpun dan menyiapkan bahan perencanaan, program, kebijakan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- b. Sub bagian keuangan dan perlengkapan.

Sub bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan

petunjuk teknis serta layanan di bagian keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bidang Operasi

Bidang Operasi Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pada Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Aset dan Seksi Intelijen.

- (1) Susunan Organisasi Bidang Operasi terdiri dari:
 - a. Seksi ketentraman , ketertiban umum dan pengamanan aset;
Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Aset mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Aset.
 - b. Seksi intelijen.
Seksi Intelijen mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Intelijen dan Pemantauan;

4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah Mempunyai tugas pokok Mengkoordinasikan, Mengendalikan Tugas-Tugas Di Bidang Penegakan Perda Yang Meliputi Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Pembinaan PPNS dan Seksi Pembinaan Masyarakat.

- (1) Susunan Organisasi Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari:
 - a. Seksi penegakan peraturan daerah dan pembinaan PPNS
Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Pembinaan PPNS mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Pembinaan PPNS.
 - b. Seksi pembinaan masyarakat;
 - c. Seksi Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pembinaan masyarakat.

5. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Seksi Perlindungan masyarakat dan Seksi Mobilisasi Perlindungan Masyarakat;

- (2) Susunan Organisasi Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Seksi perlindungan masyarakat;
Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi mobilisasi perlindungan masyarakat;
Seksi Mobilisasi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan mobilisasi perlindungan masyarakat;

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

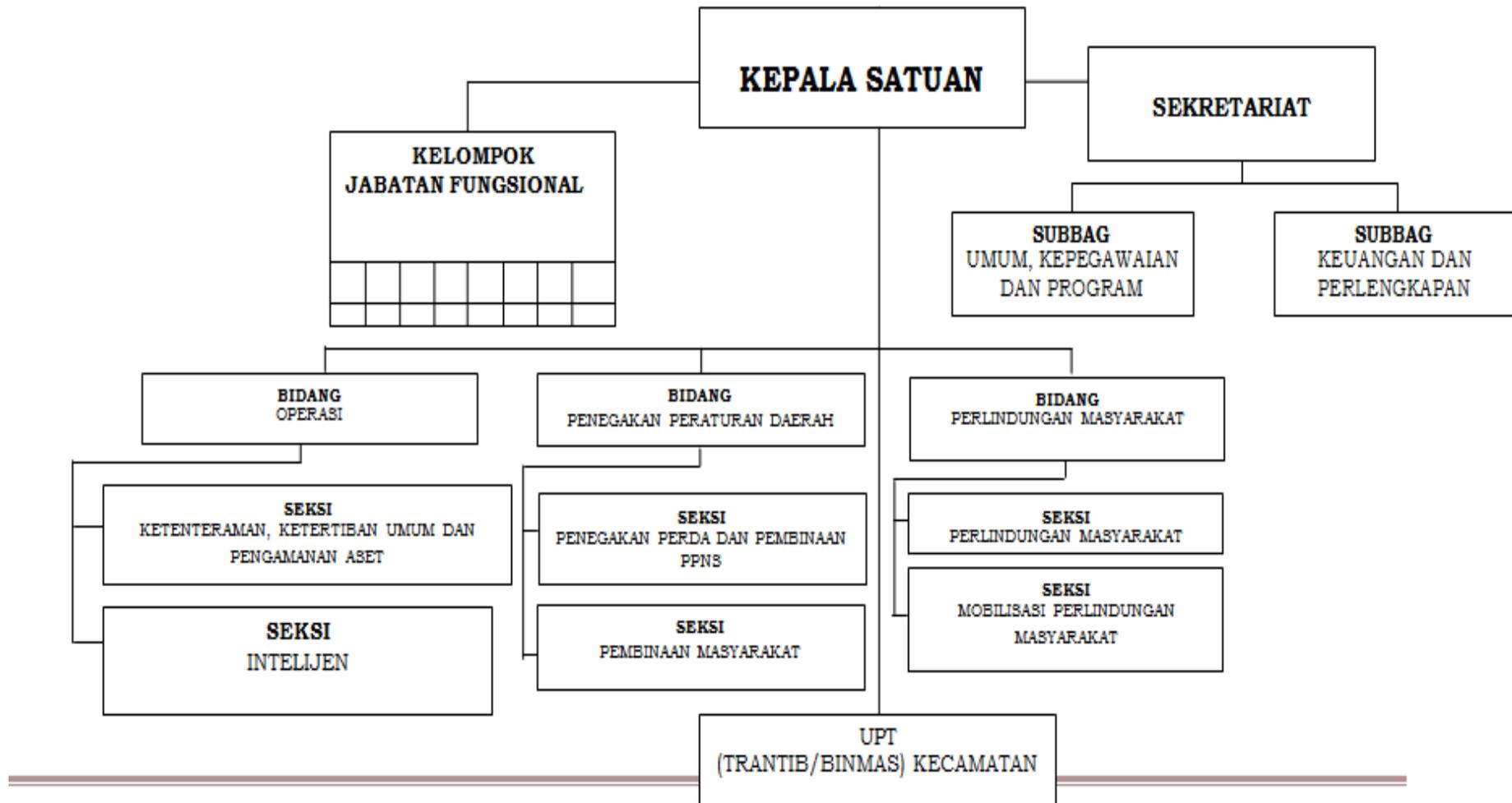
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPTD). UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Daerah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti, adalah pada **Gambar 2.1** berikut.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Kepulauan Meranti



1.4. Isu-isu Strategis Yang Dihadapi OPD

Setelah direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satpol PP Kabupaten Kepulauan Meranti ditentukan isu-isu strategis :

1. Pandemi Covid -19 merubah banyak tatanan kehidupan di dunia, tidak terkecuali di Kepulauan Meranti, sejak Bulan Maret Tahun 2020 Pemerintah Daerah menetapkan status tanggap darurat bencana non alam yaitu Pandemi Covid-19;
2. Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, dilaksanakan saat pandemi Covid – 19, Penerapan protokol kesehatan menjadi kunci suksesnya Pilkada 2020 dan masyarakat tetap sehat. Satpol – PP menjadi garda terdepan memastikan tegaknya Peraturan Bupati Perbup Kep.Meranti Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Kepulauan Meranti;
3. Masih minimnya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
4. Masih Kurangnya Sarana Prasarana Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
6. Kondisi Georafis Kabupaten Kepulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga serta wilayah kepulauan hal tersebut memerlukan upaya maksimal dalam pengamanan ketertiban umum, tentunya hal tersebut dapat terlaksana dengan kecukupan sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur yang terlatih dan handal;
7. Kondisi Demografi Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari banyak agama, suku, etnis dan keberagaman kebudayaan menjadi kebanggaan bersama yang menjalani kehidupan secara rukun dan damai. Tetapi ada potensi gesekan sosial yang mungkin terjadi ditengah masyarakat. Hal tersebut harus dilakukannya antisipasi

- dengan cara *soft power* ataupun pendekatan secara psikis serta diperlukannya penguatan deteksi dini secara berkala;
8. Penerapkan E-Government juga menjadi perhatian, khususnya melayani masyarakat dengan cara yang lebih inovatif, seperti kemudahan pengaduan masyarakat dengan ketersediaan sarana pengaduan secara elektronik. Serta dibutuhkan sistem informasi terpadu dengan pihak berwenang lainnya.

1.5. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan LKj IP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;

8. Bupati Kepulauan Meranti Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Keputusan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti

1.6. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis dan Target

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan **Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016**.

Dengan ditetapkannya **Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti : 331.1/KPTS-SATPOL-PP/2018/07**.Menjadi arah dan pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama 5 tahun mendatang. Dengan tujuan akhirnya adalah Misi Butir ke-1 (satu)

Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu “**Meningkatkan Pembinaan Mental Spiritual Dan Nilai-Nilai Luhur Kebudayaan Melayu Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani**”.

Adapun keterkaitan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti, Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti, Sebagai Berikut :

Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Jangka Menengah Kab.Kepulauan Meranti Tahun 2017-2021.

No	Tujuan	Sasaran
1	Misi 1. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dan nilai-nilai luhur Kebudayaan melayu dalam rangka mewujudkan masyarakat madani	
	Tujuan 1 : Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada, terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	1. Menurunnya Pelanggaran Perda/Perkada
		2. Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun

waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Satpol PP Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada, terselenggaranya ketertiban umum dan ketentaraman serta perlindungan masyarakat	Menurunnya Pelanggaran Perda/Perkada	Jumlah Penegakan Perda/Perkada	30	60	80	100	130
		Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat (Pekat)	25	20	15	10	5
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	75	80	85	87

2.2. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

NO.	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Menurunnya Pelanggaran Perda/Perkada	Jumlah Penegakan Perda/Perkada	Penindakan	100
2.	Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat (Pekat)	Kasus	10
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85

2.3. Target Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Tabel 2.3 Target Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

NO.	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Menurunnya Pelanggaran Perda/Perkada	Jumlah Penegakan Perda/Perkada	Penindakan	100
2.	Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat (Pekat)	Kasus	10
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Kepulauan Meranti selaku pengemban amanah masyarakat urusan pemerintahan terkait ketentaraman dan ketertiban umum melaksanakan kewajibannya untuk

menginformasikan tingkat akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Capaian Kinerja Satpol PP Kabupaten Kepulauan Meranti. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2021 maupun Renja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Satpol PP Tahun 2020

Satpol PP Kab.Kepulauan Meranti telah menetapkan indikator kinerja utama tahun 2020. Yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2017-2021. Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur capaian kinerja Satpol PP Tahun 2020, adapun pengukuran capaian atas indikator kinerja utama Satpol PP Kab.Kepulauan Meranti dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1 :Capaian Indikator Kinerja dan Satpol PP Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				Anggaran			
			Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
1.	Menurunnya Pelanggaran Perda/Perkada	Jumlah Penegakan Perda/Perkada	Penindakan	100	2.919	2.919	1.Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	38,050,000	38,025,000	99.93
							2.Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan tindak Kriminal	225,000,000	224,932,000	99.97
2.	Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat (Pekat)	Kasus	10	2	180	1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan	5,112,575,000	5,077,355,000	99.31
							2. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	28.340.000	28.340.000	100
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM	85	82.50	98.23	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	471,864,490	462,166,000	97.94
							2. Program			

NO	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				Anggaran			
			Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20,000,000	20,000,000	100
							3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	212,950,000	208,235,000	97.78
							4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	41,500,000	26,789,500	64.55
							5. Program pengembangan wawasan kebangsaan	490,210,000	483,550,000	98.64

3.2. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1

Capaian kinerja sasaran kinerja menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada, adapun Peraturan Daerah yang telah dilakukan Penegakan Perda/Perkada. Sebagai berikut :

1. Perda Kab.Kep.Meranti Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
2. Perda Kab.Kep.Meranti Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Dan Izin Mendirikan Bangunan;
3. Perda Kab.Kep.Meranti Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
4. Perda Kab.Kep.Meranti Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Daerah;
5. Perda Kab.Kep.Meranti Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Perikanan;
6. Perda Kab.Kep.Meranti Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
7. Perda Kab.Kep.Meranti Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
8. Perda Kab.Kep.Meranti Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pasar Dikabupaten Kepulauan Meranti;
9. Perbup Kep.Meranti Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

10. Perbup Kep.Meranti Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pada tahun 2020 Satpol PP telah menegakkan Perda/Perkada sebanyak 2.919 Penindakan pelanggaran Perda/Perkada dengan upaya penegakan non yustisia maupun pro yustisia. Selain dari upaya penegakan/penindakan Satpol PP juga melakukan upaya Preventif dengan mensosialisasi Perda serta melakukan monitoring rutin khusus terkait perizinan usaha dan retribusi daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penegakan Perkada Terkait penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 menjadi fokus Satpol – PP selaku Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kepulauan Meranti, capaian Penegakan Perkada terkait pelanggaran protokol kesehatan tahun 2020 tercatat 2.755 Penindakan, berdasarkan jumlah hari operasi Yustisi yang dilaksanakan tim Gabungan Satpol PP, Dinas Perhubungan, TNI, dan Polri.

Adapun capaian kinerja Sasaran Menurunnya Pelanggaran Perda sebagai berikut :

NO.	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menurunnya Pelanggaran Perda/Perkada	Jumlah Penegakan Perda / Perkada	Penindakan	100	2.919	2.919

Tabel 3.2 Capaian indikator kinerja utama sasaran 1 Satpol PP Tahun 2020

Kemudian, perbandingan capaian kinerja indikator kinerja utama sasaran ke-1 dalam periode 3 tahun terakhir, dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Realisasi Capaian (%)
2017	26	22	86,6
2018	60	132	220
2019	80	88	110
2020	100	2.919	2.919

Tabel 3.3 : Perbandingan Capaian indikator kinerja utama sasaran 1
4 tahun terakhir Satpol PP

Dari hasil pencapaian sasaran 1 dapat diuraikan permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target kinerja, serta solusi permasalahan tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

Permasalahan:

- a. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada masih rendah;
- b. Keselarasan pemahaman Instansi Pemerintah terkait penegakan Perda/Perkada belum optimal;
- c. Masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan Perda/Perkada kepada Masyarakat;
- d. Kurangnya koordinasi yang optimal antar instansi terkait penegakan Perda/Perkada.

Solusi:

- a. Meningkatkan penyuluhan, sosialisasi serta publikasi Perda/Perkada kepada masyarakat;
- b. Dilakukannya sinkronisasi dan harmonisasi terkait Perda/Perkada dan aturan pendukung lainnya;

- c. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholders terkait penegakan Perda/Perkada.
- d. Pembentukan Tim Yustisi selaku tim gabungan Penegak Perda yang terdiri dari Pol PP, TNI, Kejaksaan, POLRI, Pengadilan, dan PD terkait Penagakan Perda lainnya.

Sasaran Strategis 2

Sasaran ke - 2: Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ke-2, indikator yang digunakan adalah Jumlah Penurunan kasus penyakit masyarakat (Pekat), yang tergolong kasus pekat adalah Penyakit masyarakat adalah perilaku masyarakat yang menyimpang dari norma agama dan sosial seperti Narkoba, Miras, Judi dan PSK. Dalam pencapaian kinerja sasaran ke-2, semakin rendahnya jumlah kasus Pekat akan semakin baik capaian kinerja. Upaya meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum menjadi salah satu tujuan sasaran daerah pada RPJMD 2016- 2021. Adapun capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

NO.	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat (Pekat)	Kasus	10	2	180

Tabel 3.4 : Capaian indikator kinerja utama sasaran 2 Satpol PP
Tahun 2020

Sebagai perbandingan pengukuran kinerja sasaran ke-2, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target	Realisasi Capaian	Realisasi Capaian (%)
2017	25	24	96
2018	20	6	170
2019	15	5	166
2020	10	2	180

Tabel 3.3 : Perbandingan Capaian indikator kinerja utama sasaran ke-2 4 tahun terakhir Satpol PP

Permasalahan:

- a. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mematuhi Perda/Perkada terkait pencegahan Penyakit Masyarakat (Pekat);
- b. Kurangnya pengawasan dan bimbingan orang tua dan lingkungan masyarakat terhadap remaja mengakibatkan mudahnya pengaruh negatif sehingga mengakibatkan remaja tersandung Pekat.
- c. Belum maksimalnya peran lembaga trantibnas ditingkat Desa dan Kecamatan;
- d. Belum maksimalnya peran stakeholder terkait pencegahan Pekat.

Solusi:

- a. Meningkatkan pengawasan dan memaksimalkan koordinasi antar stakeholder terkait dalam upaya penurunan Pekat;
- b. Membentuk lembaga Satlinmas yang mengacu Permendagri Nomor 84 tahun 2014;
- c. Melakukan Patroli rutin dan Razia sebagai bentuk Upaya preventif terjadinya Pekat;

- d. Meningkatkan penyuluhan seperti program Satpol PP Goes to School agar generasi muda yang rentan terhadap Pekat tidak mudah terpengaruh lingkungan buruk;
- e. Meningkatkan peran Satlinmas agar lebih aktif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di setiap RT/RW setempat;

Sasaran Strategis ke- 3

Sasaran strategis ke-3: Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD.

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan urusan pemerintahan urusan wajib pelayanan daerah, yaitu urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan dasar kepada masyarakat, Satpol PP tentunya harus meningkatkannya pelayanan kepada masyarakat, untuk mengukur kualitas pelayanan Satpol PP telah melakukan survei Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2019. Responden yang melakukan survey yaitu masyarakat yang terdampak atau menerima pelayanan dari Satpol PP, antara lain, pelaku usaha, pelajar, dan masyarakat umum lainnya. Survey isi dari kuisisioner servey berisikan bagaimana pelayanan dilakukan, respon pelayanan, sarana pendukung serta capaian kinerja yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Adapun capaian indikator utama (IKU) sasaran strategis ke-3 sebagai berikut :

NO.	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM	85	82.50	98.23

Tabel 3.9: Capaian Indikator IKU Ke-3.

Kemudian sebagai bentuk perbandingan pencapaian kinerja indikator sasaran ke-3, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Target	Realisasi Capaian	Realisasi Capaian (%)
2017	70	71	101
2018	75	73	97.3
2019	80	82	102
2020	85	82.50	98.23

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian indikator kinerja utama sasaran ke-3 berapa tahun terakhir Satpol PP

Dari hasil pencapaian sasaran IKM dapat diuraikan permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target kinerja, serta solusi permasalahan tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

Permasalahan:

- a. Belum optimalnya layanan pengaduan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Satpol PP;
- b. Sangat kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat dan peningkatan kinerja Satpol PP;
- c. Perlunya peningkatan kompetensi aparatur Satpol PP.

Solusi:

- a. Menyediakan layanan pengaduan masyarakat yang optimal dan pengembangan teknologi informasi;
- b. Memberikan pendidikan dan pelatihan ASN Satpol PP;
- c. Menambah jumlah sarana dan prasarana pendukung Satpol PP.

Tabel 3.11 : Capaian Kinerja Program/Kegiatan Satpol PP Tahun 2020 dan Perbandingan Tahun lalu 2019

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2020		Persentase Tingkat Capaian Kinerja Tahun Lalu (2019)
				4 (K)	5 (Rp)	6(K)	7(Rp)	8=(6/4)*100%	9=(7/5)*100%	
1	2	3		4 (K)	5 (Rp)	6(K)	7(Rp)	8=(6/4)*100%	9=(7/5)*100%	10
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Perangkat Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	471.864.490	100	462.166.000	100	100	100
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	Persen							100
	Penyediaan jasa komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Ketersediaan Telpon, Air dan Listrik	Persen							100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	Orang							3
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor	Persen							100
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persen							100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Kerersediaan Instalansi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Persen							100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eksemplar							100
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Bermotor	Persen							100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Kordinasi	Kali	100	222.288.000	91	221.826.000	91	99.79	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2020		Persentase Tingkat Capaian Kinerja Tahun Lalu (2019)
				4 (K)	5 (Rp)	6(K)	7(Rp)	8=(6/4)*100%	9=(7/5)*100%	
1	2	3		4 (K)	5 (Rp)	6(K)	7(Rp)	8=(6/4)*100%	9=(7/5)*100%	10
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah Tenaga Jasa Perkantoran	Orang/ Bulan	60	72.000.000	60	72.000.000	100	100	-
	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Persen	100	177.576.490	100	168.340.000	100	100	-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	75	66.395.000	65	56.101.000	80	65	80
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Frekuensi Pemeliharaan	Unit							80
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Frekuensi Dilakukannya Pemeliharaan	Frekuensi							80
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Frekuensi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Frekuensi	20	20.000.000	20	20.000.000	100	100	-
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Ketersediaan Perangkat Pendukung Disiplin Aparatur	%	80	225.750.000	75	210.403.000	75	93	75
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Satpol PP	Stel	250	224.720.000	302	220.645.000	120.8	97.61	250
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi	Persen	75	365.820.000	65	356.802.000	100	97.35	100
	Marching Band Satpol PP Kabupaten Kepulauan	Jumlah Personil Marching Band Satpol PP	Orang	33	365.820.000	33	356.802.000	100	97.53	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2020		Persentase Tingkat Capaian Kinerja Tahun Lalu (2019)
				4 (K)	5 (Rp)	6(K)	7(Rp)	8=(6/4)*100%	9=(7/5)*100%	
1	2	3		4 (K)	5 (Rp)	6(K)	7(Rp)	8=(6/4)*100%	9=(7/5)*100%	10
	Meranti									
	Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Aparatur	Jumlah Frekuensi Mengikuti Diklat / Bimtek	Frekuensi	3	91.650.000	3	89.325.000	100	97.46	-
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Tersusun	Persen	100	75.000.000	100	74.785.000	100	99.56	100
	Penyusunan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)OPD	Jumlah Dokumen SAKIP	Laporan							100
	Penyusunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen							100
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Kelengkapan Dokumen PD Berkualitas yang Tersusun	Dokumen	36	41.500.000	36	26.789.500	36	64.55	-
6.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penegakan Perda/Perkada	Penindakan	100	38.050.000	273	38.025.000	273	100	110
	Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Perda	Jumlah Frekuensi Pengawasan terhadap Perda	Freq	100	38.050.000	273	38.025.000	273	99.93	110
7.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan yang meningkat	Persen	93	5.112.575.000	94.6	5.077.355.000	94.6	99.31	52

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2020		Persentase Tingkat Capaian Kinerja Tahun Lalu (2019)
				4 (K)	5 (Rp)	6(K)	7(Rp)	8=(6/4)*100%	9=(7/5)*100%	
1	2	3		4 (K)	5 (Rp)	6(K)	7(Rp)	8=(6/4)*100%	9=(7/5)*100%	10
	Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Personil Banpol PP	Orang	192	5.112.575.000	192	5.077.355.000	100	99.52	100
	Pengawasan dan Pengamanan Pejabat Daerah dan Negara	Jumlah Ketersediaan Pengawasan Pengamanan Pejabat Daerah dan Negara	Bulan	12	0	0	0	0	0	0
	Pengendalian dan Pengamanan pada upacara penting Kenegaraan	Jumlah Upacara/Hari Besar yang Dilakukan Pengendalian dan Pengamanan	Frekuensi	17	37.175.000	17	26.155.000	100	70.36	100
	Pengamanan dan Pengendalian Unjuk Rasa	Jumlah Frekuensi Pengendalian dan Pengamanan Unjuk Rasa	Frekuensi							10
8.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang Memiliki wawasan kebangsaan/Bela Negara	Persen	80	490.210.000	75	483.550.500	93.8	98.64	50
	Peningkatan Solidaritas Satpol PP	Jumlah Upaya Peningkatan Solidaritas Satpol PP	Event	1	24.000.000	1	24.000.000	100	99	100
	Pemberdayaan Satlinmas dan Masyarakat dalam Pengamanan Swakarsa	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Pengamanan Swakarsa	Jmlh Pmberdayaan	600	466.210.000	930	459.550.500	155	98.57	-
9.	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan tindak Kriminal	Jumlah Peningkatan upaya pencegahan dan pemeliharaan Kantrantibnas	Frekuensi	30	225,000,000	109	225,000,000	363	100	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2020		Persentase Tingkat Capaian Kinerja Tahun Lalu (2019)
				4 (K)	5 (Rp)	6(K)	7(Rp)	8=(6/4)*100%	9=(7/5)*100%	
1	2	3		4 (K)	5 (Rp)	6(K)	7(Rp)	8=(6/4)*100%	9=(7/5)*100%	10
	Peningkatan Kerjasam Tim operasional Yustisi dalam Penegakan Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Meranti	Jumlah Laporan Operasi Yustisi	Frekuensi	4	225,000,000	10	225,000,000	250	100	-
10.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat dan Penyalahgunaan Aset Daerah	Kasus	10	29.550.000	5	29.550.000	166	100	96
	Operasi Penyakit Masyarakat	Jumlah Operasi	Frekuensi	60	28.340.000	60	28.340.000	100	100	100
TOTAL					6.866.419.490		6.791.248.000			
RATA CAPAIAN KINERJA								385.9	98.91	89.1

3.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah dalam dokumen Rencana Strategis.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Renstra 2017-2021			
			Target Tahun 2017-2021	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menurunnya Pelanggaran Perda/Perkada	Jumlah Penegakan Perda/Perkada	130	88	2.919	2.245
2.	Meningkatnya penyelenggaraa n ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat (Pekat)	5	5	2	160
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	82	82.50	94.82

3.4. Akuntabilitas Keuangan



Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja Pemerintah dan Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis akrual dipemerintah daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti selaku salah satu entitas akuntansi berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti yang salah satunya dialokasikan dan dikelola oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti selama periode pelaporan 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020.

3.4.1 LAPORAN REALISASI DAN ANGGARAN

Laporan Realisasi dan Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Belanja Daerah pada TA 2020 adalah sebesar Rp.12.530.550.790,00 atau mencapai 97,57% dari anggaran sebesar Rp.12.841.990.053,00. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00.

	TA 2020		TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
📁 Pendapatan Daerah	0.00	0.00	0.00
📁 Belanja Daerah	12.841.990.053,00	12.530.550.790,00	10.774.687.609,00
📁 Surplus (Defisit)	(12.841.990.053,00)	(12.530.550.790,00)	(10.774.687.609,00)

3.4.2 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah dalam 1 periode laporan yang mencakup unsur- unsur Pendapatan-LO, beban, transfer dan pos- pos luar biasa.

Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki beban-LO pada TA 2020 adalah sebesar Rp.12.530.550.790,00. Jumlah Beban- LO tersebut terdiri dari realisasi Beban Operasi sebesar Rp.12.530.550.790,00, dan beban transfer Rp0,00. Pada Laporan Operasional TA 2020 adalah sebesar Rp.12.530.550.790,00.

Realisasi TA 2020	
(Rp)	
📁 Pendapatan Daerah	0.00
📁 Beban Daerah	Rp1.2.530.550.790,00
📁 Surplus (Defisit)	Rp(12.530.550.790,00)

3.4.3 PELAPORAN KINERJA

Untuk tahun anggaran 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti telah merencanakan untuk melaksanakan 10 (Sepuluh) program dan 16 (Enam Belas) kegiatan dengan anggaran belanja langsung yang tersedia sebesar Rp. 6.866.419.490,00 dari keseluruhan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp. 12.841.990.053,00.

3.5. Analisis Efisiensi dan Sumber Daya

Indikator pencapaian target kinerja APBD merupakan indikator kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan dan informasi tentang pencapaian efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, yang tertuang dalam APBD. Indikator pencapaian target kinerja yang dimaksud adalah:

1. Indikator capaian program (sasaran), tolok ukur kinerjanya berupa obyek sasaran program/kegiatan yang akan dicapai. Target kinerjanya
2. ditampilkan dalam bentuk jumlah obyek sasaran program/kegiatan, yang mencerminkan jumlah yang akan dicapai dari suatu program/kegiatan;
3. Indikator masukan (*input*), tolok ukur kinerjanya adalah jumlah dana, sumber daya manusia (SDM), dan peralatan yang digunakan. Target kinerjanya yaitu rupiah untuk jumlah dana, orang untuk SDM dan satuan untuk peralatan yang digunakan untuk mencapai suatu target;
4. Indikator keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan dengan target kinerja berupa jumlah/volume sasaran yang dicapai;
5. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari program/kegiatan, tolok ukur kinerjanya adalah manfaat dari terlaksananya kegiatan. Target kinerjanya ditunjukkan dengan persentase yang merupakan perbandingan antara capaian dengan jumlah objek sasaran program/kegiatan.

Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**PENCAPAIAN TARGET KINERJA
APBD TAHUN 2020**

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI	ANGGARAN (Rp)	RELISASI (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	471,864,490	462,166,000	9,698,490	2,06
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	20,000,000	20,000,000	0	0
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	224,720,000	220,645,000	4,075,000	1.81
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	212,950,000	208,235,000	4,715,000	2,21
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	41,500,000	26,789,500	14,710,500	35,45
	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	38,050,000	38,025,000	25,000	0,07
	PROGRAM PENINGKATAN				

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI	ANGGARAN (Rp)	RELISASI (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
	KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	5,112,575,000	5,077,355,000	35,220,000	0,69
	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	490,210,000	483,550,000	6,660,000	1,36
	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBNAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	225,000,000	224,932,000	68,000	0.03
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	29,550,000	29,550,000	0,00	0,00

dari data di atas Realisasi anggaran Satpol PP Kab.Kepulauan Meranti mencapai 98,90% dengan efisiensi anggaran 1,1 %. Tentunya efisiensi anggaran relatif rendah. Hal tersebut disebabkan tinggi beban kinerja yang diemban Satpol PP Kab.Kepulauan Meranti untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun Tingkat Efektifitas Dan Efisiensi Kinerja Sasaran strategis Satpol PP Kab.Kepulauan Meranti, sebagai berikut :

a. Efisiensi Dan Efektifitas Sasaran Strategis 1

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Menurunnya Pelanggaran Perda/Perkada	1. Jumlah Penegakan Perda/Perkada	Penindakan	100	2.919	2.919	1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	38,050,000	38,025,000	99,93
							2. Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan tindak Kriminal	225.000.000	225.000.000	100
							RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			TOTAL PER SASARAN
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> (2.819,07 %)										
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> (2.819 %)										

b. Efisiensi Dan Efektifitas Sasaran Strategis 2

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
2	Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	2. Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat (Pekat)	Kasus	10	2	180	1	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	29,550,000	29,550,000	100
							2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5,112,575,000	5,077,355,000	99,31
							RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			TOTAL PER SASARAN	5,142,125,000
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> (81%)											
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> (80 %)											

c. Efisiensi Dan Efektifitas Sasaran Strategis 3

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM	85	82.50	98.23	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	471,864,490	462,166,000	97.94
								2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20,000,000	20,000,000	100
								3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	212,950,000	208,235,000	97.79
								4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	41,500,000	26,789,500	64.55
								5. Program pengembangan wawasan kebangsaan	490,210,000	483,550,000	98.64

		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR		TOTAL PER SASARAN	1,236,524,490	1,200,740,500	91.78
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 6.45 %							
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> (-1.77) %							

3.6. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020,terdapat 2 IKU yang memenuhi target, sedangkan 1 IKU belum memenuhi target yang ditetapkan.
2. Realisasi Belanja Daerah pada TA 2020 adalah sebesar Rp.12.530.550.790,00 atau mencapai 97,57% dari anggaran sebesar Rp.12.841.990.053,00.
3. Kinerja Satpol PP Tahun Anggaran 2020, meningkatkan dibandingkan tahun 2019, hal tersebut disebabkan tingginya capaian kinerja Satpol PP terkait penanganan Covid-19 ,bagian dari Perlindungan Masyarakat yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Satpol PP;
4. Satpol PP selaku Koordinator Tim Keamanan dan Gakkum Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kepulauan Meranti melakukan Refocusing anggaran dalam rangka pemenuhan operasional penanganan Covid-19, yang melibatkan TNI, POLRI, DISHUB dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.

5.2. Saran

Dari pembahasan laporan kinerja instansi pemerintah Satpol PP Kepulauan Meranti disarankan berikut :

1. Perlu peningkatan anggaran pelaksanaan kinerja Satpol PP;
2. Refocusing Program/kegiatan Satpol PP;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Miniman (SPM) harus dapat dipenuhi.
4. Pemenuhan sarana minimal Satpol menjadi prioritas untuk pencapaian kinerja yang lebih baik;
5. Pengembangan SDM juga sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja serta untuk pencapaian SPM Satpol PP;

LAMPIRAN

SATPOL PP PERFORMANCE AT 2020

© COPY RIGHT

HANG KEBUN MERANTI



Always Serve The People
Kepulauan Meranti Regency

